

KATA PENGANTAR

FAISAL H. BASRI *)

Krisis perbankan di Indonesia tergolong yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis-krisis serupa yang pernah terjadi di berbagai negara selama ini. Gelombang krisis yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 tak hanya membuat bank-bank bobrok bertumbangan, melainkan juga telah memporandakan sendi-sendi industri perbankan khususnya dan juga membuat perekonomian terperosok ke dalam perangkap pertumbuhan rendah hingga sekarang dan bahkan sampai beberapa tahun ke depan.

Hampir separuh produk domestik bruto tahunan sudah terbenam untuk menyelamatkan industri perbankan nasional dari kehancuran total. Aset-aset perbankan dalam bentuk kredit yang dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hanya sedikit sekali yang bisa diselamatkan, sehingga hanya menghasilkan *recovery rate* yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena aset-aset ini justru semakin membusuk di dalam genggaman BPPN yang salah satu tugasnya adalah melakukan restrukturisasi atas aset-aset perbankan tersebut.

Jumlah bank yang bisa bertahan tinggal sekitar separuh saja dari jumlah bank sebelum krisis. Sisanya sampai sekarang masih tetap tertatih-tatih dalam proses pemulihan. Buktinya fungsi intermediasi perbankan, sekalipun cenderung membaik

dalam dua tahun terakhir, namun masih sangat jauh dari tingkat sebelum krisis. Data per Agustus 2003 menunjukkan bahwa *loan to deposit ratio* (LDR) baru mencapai 52 persen, yang berarti tak sampai separuh dari tingkat sebelum krisis sebesar 106 persen pada tahun 1997. Dinyatakan dalam persentase terhadap produk domestik bruto (PDB), kredit yang disalurkan oleh perbankan Indonesia hanya sekitar 20 persen dan ini telah berlangsung selama lima tahun terakhir. Bandingkan misalnya dengan Korea yang terus meningkat hingga mencapai 80 persen pada tahun 2002. Nisbah (*ratio*) untuk Malaysia lebih baik lagi, yaitu hampir mencapai 100 persen. Sementara itu, Thailand ada di kisaran 60 persen.

Beberapa bank yang kepemilikannya telah dialihkan kembali kepada swasta lewat program divestasi memang berangsur menunjukkan perbaikan. Demikian juga bank-bank yang masih di bawah pengendalian BPPN. Namun, masih teramat banyak masalah tersisa yang tetap menggelayuti industri perbankan Indonesia. Perbaikan yang terjadi pada bank-bank yang pernah menikmati kucuran dana ratusan triliun rupiah dimungkinkan karena mereka masih "mendekap" obligasi rekapitalisasi, sehingga menikmati bunganya atas beban seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, beberapa bank menikmati pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi yang lebih besar ketimbang pendapatan operasionalnya. Artinya, perbaikan yang terjadi hanya dimungkinkan karena rakyat turut memberikan subsidi. Hal demikian tak terjadi di negara-negara lain yang mengalami krisis serupa.

Masalah lain yang menandakan perbankan masih jauh dari pulih dan sehat terlihat dari porsi ekspansi kredit yang porsi terbesarnya ternyata adalah kredit konsumsi dan kredit untuk properti. Dengan semakin ketatnya persaingan di industri perbankan, jalan pintas yang paling mudah dilakukan

ialah dengan memberikan beragam kemudahan dan fasilitas layanan untuk kredit konsumsi, sehingga tak mengherankan kalau porsi kredit konsumsi terhadap kredit keseluruhan terus meningkat. Pada tahun 1998 porsi kredit konsumsi baru sebesar 6,5 persen. Empat tahun berikutnya, yakni 2002, melonjak tajam menjadi 21,8 persen. Sampai Oktober 2003 masih menunjukkan kenaikan, yakni menjadi 24,1 persen. Sebaliknya, porsi kredit investasi dan modal kerja cenderung mengalami penurunan.

Perbankan nasional masih sangat enggan menyalurkan kredit untuk investasi baru ataupun untuk modal kerja. Tengok saja kenyataan bahwa suku bunga untuk kedua jenis kredit ini masih saja bertengger di tingkat yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan suku bunga deposito yang terus turun dan dewasa ini sudah di bawah 7 persen. *Spread* atau selisih suku bunga kredit investasi dan suku bunga deposito yang sangat besar—lebih 10 persen—menandakan perbankan nasional masih dijangkiti persoalan struktural.

Masih lemahnya fungsi intermediasi perbankan juga disebabkan oleh faktor regulasi atau kebijakan pemerintah. Bank-bank rekap—yang notabene merupakan sepuluh besar—semakin tak terdorong untuk menyalurkan kredit karena bisa memperoleh pendapatan tanpa risiko berarti dengan mengolah obligasi rekapitalisasi yang mereka genggam menjadi produk reksa dana. Instrumen yang sangat cepat berkembang ini—dari hanya Rp 8 triliun pada pertengahan 2001 menjadi sekitar Rp 90 triliun pada akhir 2003—tidak dikenakan pajak sebagaimana deposito.

Semakin parah lagi karena perbankan nasional sangat tidak inovatif dalam mengembangkan produk-produknya, termasuk kredit. Dunia perbankan nasional tergolong industri yang paling “pelit” dalam mengalokasikan dana untuk kegi-

atan riset dan pengembangan, sehingga praktis tak ada inovasi berarti. Kiat-kiat mereka masih sama saja dengan yang dilakukan 10 tahun lalu, masih di seputar pemberian iming-iming hadiah, pelayanan istimewa untuk nasabah yang berlebihan, misalnya menyediakan ruang tunggu eksklusif di dalam *lounge* di beberapa bandara. Tak ada satu pun bank ataupun upaya bersama sejumlah bank untuk melakukan semacam *baseline survey* untuk mengetahui secara mendalam industri-industri ataupun daerah-daerah yang potensial untuk memperoleh pembiayaan perbankan.

Di tengah mulai muncul optimisme baru akan kebangkitan perbankan, tiba-tiba kita dikejutkan oleh skandal pembebohan BNI dan BRI. Tampaknya, dua kasus ini bukanlah yang terakhir. Kasus-kasus lainnya siap meledak, terutama di bank-bank milik pemerintah. Beberapa di antaranya juga selama ini dikenal sebagai pembeli agresif kredit-kredit "busuk" dari BPPN dan bahkan boleh dikatakan menjadi mediator bagi sejumlah pengusaha untuk membeli kembali aset-aset mereka dari BPPN dengan harga yang sangat murah.

Dengan latar belakang keadaan perbankan seperti di atas dan gemuruh krisis ekonomi yang masih terus mewarnai kehidupan bangsa inilah, buku yang ditulis oleh seorang yang memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan terasa memiliki tempat tersendiri. Tak hanya sebatas bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan liku-liku perbankan, melainkan juga bagi kalangan praktisi dan siapa pun yang hendak lebih memahami kehidupan dunia perbankan.

Bapak Masyhud Ali adalah saksi dan pelaku langsung dari perjalanan panjang perbankan Indonesia. Ia mengikuti dan merasakan masa kejayaan perbankan. Ia juga menjadi saksi

dari buruknya manajemen risiko salah satu bank BUMN. Di masa akhir pengabdianya sebagai bankir, penulis merasakan sendiri getirnya krisis yang berimbas kepada bank yang sedang ia pimpin. Boleh jadi, bank yang ia pimpin memiliki beberapa kelemahan dan melakukan kesalahan-kesalahan, namun tak bisa dipungkiri pula bahwa carut-marut pengawasan dan penanganan krisis perbankan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) turut pula membuat nasib bank yang ia pimpin terkubur bersama-sama dengan puluhan bank lainnya.

Pelajaran berharga inilah yang membuat penulis lebih tajam dalam membedah manajemen perbankan. Yang intinya ialah pengelolaan risiko yang berkaitan dengan *assets* dan *liabilities* atau sisi aktiva dan pasiva dari neraca bank. Buku ini semakin diperkaya oleh pengalaman penulis sebagai pengajar. Sebagian besar materi yang tertuang dalam buku ini telah diujicobakan kepada para mahasiswanya dan telah pula mendapat masukan dari rekan-rekan sesama pengajar mata kuliah *Asset Liability Management*. Kecintaannya mengajar dan antusiasmenya untuk menyebarluaskan ilmu yang ia miliki membuat penulis begitu bersemangat untuk segera menyelesaikan buku ini, setelah sebelumnya menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan dunia perbankan.

Buku ini diawali dengan analisis terhadap krisis ekonomi dan perbankan yang mulai melanda Indonesia pada tahun 1997. Ia menguraikan latar belakang krisis, penyebab, dan segala konsekuensinya. Pada bab ini, penulis juga mengutarakan pelajaran berharga yang sepatutnya dijadikan modal untuk menata kembali dunia perbankan Indonesia beserta dengan kerangka regulasinya. Pada bab-bab selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut ia uraikan dengan lebih rinci disertai dengan contoh-contoh yang memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Penulis mendasari uraian rincinya dengan kerangka teoretis sebagaimana tertuang di dalam bab ketiga. Dengan cara ini, penulis berusaha keras menjembatani antara teori dan praktik, sehingga para pembaca sangat terbantu untuk memahami persoalan pengelolaan bank yang riil.

Semoga buku ini memberikan bekal dan wawasan yang lebih luas bagi para pembacanya, khususnya para mahasiswa. Nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam buku ini sungguh menjadi nilai tambah tersendiri di tengah kian keroposnya peradaban di segala bidang kehidupan. Secara implisit, penulis mengajak pembacanya untuk membangun kembali profesionalisme para pengelola bank dengan sumber daya manusia yang kian tangguh dan memiliki moralitas tinggi agar perbankan nasional bisa kembali tumbuh sehat, sehingga memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta, Maret 2004

Faisal H. Basri

¹Faisal H. Basri SE, MA.

Ketua STIE PEBANAS (1998-2003)

Senior Economist INDEF. dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPV)